



Penerapan Sistem Informasi Inventarisasi (Simfoni) Barang Milik Daerah (Bmd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru

Yolanda Aryan Febri^{1✉}, Agustiawan²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email : 190301184@student.umri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai proses penerapan aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi (SIMFONI) Barang Milik Daerah (BMD) dalam pengelolaan BMD, apakah SIMFONI BMD efektif dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, dengan objek penelitian ini adalah data primer dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi SIMFONI BMD yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebagai aplikasi berbasis komputer belum efektif namun sudah sangat membantu pemerintah mengelola barang milik daerah sehingga dapat menghasilkan laporan-laporan yang berguna bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan untuk rencana yang akan datang.

Kata Kunci : *SIMFONI, BMD*

Abstract

This research aims to obtain further insight into the process of implementing the Regional Property Inventory Information System (SIMFONI) application (BMD) in BMD management, whether SIMFONI BMD is effective and what factors influence its effectiveness, with the object of this research being primary data by data collection through interviews and documentation which was then analyzed using qualitative descriptive analysis methods. The data used is primary data in the form of interview results. The results of the research show that the SIMFONI BMD application implemented at the Pekanbaru City Regional Financial and Asset Management Agency as a computer-based application is not yet effective but has really helped the government manage regional property so that it can produce useful reports for the regional government which can be used for decision making. for future plans.

Keywords: *SYMPHONY, BMD*

PENDAHULUAN

Instansi pemerintah merupakan penyelenggara pemerintah, dan sebagai pengguna anggaran Negara yang wajib mempertanggungjawabkan tugas pokoknya dalam melakukan pengelolaan keuangan dan fungsinya menurut suatu perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Penerapan sistem pertanggungjawaban tersebut harus tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggara pemerintah dapat berlangsung bersih dan bertanggungjawab.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dari badan milik daerah sangat memiliki hubungan yang jelas. Dalam keuangan Negara pengelolaan dan pertanggungjawaban atas badan milik daerah ini telah menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan lagi. Bentuk laporan keuangan pemerintah pusat adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dimana BMN termasuk di dalamnya. Mengingat pentingnya peranan laporan keuangan dalam menyajikan informasi pelaksanaan APBN/APBD yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter agar tercipta perekonomian nasional yang lebih baik dan sehat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) telah ditunjuk sebagai pembuat dan pembina Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) oleh Menteri Keuangan selaku pemegang kekuasaan fiskal. Wujud dari pelaksanaan tugas sebagai pembuat dan Pembina sistem oleh DJPB adalah terciptanya berbagai peraturan dan aplikasi komputer yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di semua level, mulai dari tingkat Kementerian sampai dengan Satuan Kerja (Satker) (Nasrun dkk, 2012). Jadi oleh karena itu, dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban atas BMD ini telah dibuatkan sebuah sistem yang disebut Sistem Informasi Inventarisasi barang Milik Daerah.

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban pemerintah juga harus memeriksa kembali penatausahaan aset barang milik daerah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah tercatat dengan baik. Terkadang masyarakat kurang memperhatikan apa saja yang menjadi barang milik daerah (aset) yang ada di daerah masing-masing dan apakah barang milik negara tersebut sudah digunakan oleh pemerintah dengan baik dan benar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Pekanbaru sebagai suatu organisasi yang menggunakan pembiayaan APBD harus mampu mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien sebagai wujud pertanggungjawaban publiknya. Untuk mencapai hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru harus menerapkan sistem informasi inventarisasi BMD, oleh karena itu penulis tertarik tertarik melakukan peninjauan dan penelitian dengan dengan judul Penerapan Sistem

Informasi Inventarisasi (SIMFONI) Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Sistem

Jogiyanto (2005) sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi agar bisa mewujudkan suatu tujuan tertentu, selanjutnya Hall (2007) sistem merupakan sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berfungsi dan berhubungan satu sama lain dengan tujuan yang sama.

Selanjutnya Sutanta (2003) bentuk umum sistem dari suatu sistem yang terdiri atas masukan (input), proses dan keluaran (output), dalam bentuk umum sistem ini terdapat lebih dari satu masukan yang akan diproses dan dihasilkan sebuah keluaran.

1.2 Pengertian Informasi

Jogiyanto (2008) informasi merupakan data yang akan diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya. Sutarman (2012) informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang dikelompokkan dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi yang menerimanya. Yakub (2012) informasi ialah data yang akan diolah agar lebih berguna bagi penggunaannya.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa "informasi merupakan data yang telah diolah, dibentuk, ataupun dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu bagi penggunaannya".

2.3 Pengertian Sistem Informasi

Stair dan Reynolds (2008) sistem informasi adalah rangkaian dari komponen-komponen yang mengumpulkan, menyebarkan, data dan informasi serta menyediakan sebuah mekanisme timbal balik untuk mewujudkan suatu tujuan. Satzinger (2010) sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi sebagai hasil dari informasi

2.4 Pengertian inventarisasi barang

Menurut kamus besar Indonesia (2007) ada dua pengertian inventarisasi, yaitu inventarisasi adalah pencacatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor, sekolah, rumah tangga, dan sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas dan inventarisasi dapat diartikan sebagai pencacatan atau pengumpulan data tentang kegiatan, hasil yang akan dicapai, pendapat umum, persurat kabaran, kebudayaan dan sebagainya. Sedangkan menurut purnama (2007) invanteris adalah daftar barang-barang persediaan.

2.5 Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan:

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang telah dibeli atau didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan biaya lainnya yang sah
 2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
- Permendagri No 27 Tahun 2014 Pasal 2 menyatakan bahwa:

Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut M. Yusuf (2010:13) Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan benar agar terwujud pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang fungsinya bisa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif dalam kajian metodologi penelitian ini selalu dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang sudah disebutkan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010).

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti penulis bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 20 Juni 2023 – 9 Agustus 2023.

Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat untuk memperoleh data setiap variabel penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut (Sugiyono, 2013). Wawancara mendalam dilakukan terhadap pihak yang terkait dengan pengguna SIMFONI BMD. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu, penyusun kebutuhan inventaris barang BPKAD kota Pekanbaru

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dalam pengumpulan data meliputi observasi secara langsung kepada pihak penyusun kebutuhan inventaris barang untuk mengetahui apakah aplikasi SIMFONI tersebut sudah efisien dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka menjamin terlaksananya administrasi yang tertib dan tertib pengelolaan BMD, diperlukannya persepsi yang sama dan langkah secara integral dan menyeluruh dari hal-hal yang terkait dalam pengelolaan BMD, diterbitkanlah beberapa regulasi yang mengatur pengelolaan BMD di Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi regulasi pengelolaan BMD, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mewujudkan komitmennya untuk dapat mengelola BMD secara tertib. Tim pengelola BMD Kota Pekanbaru menggunakan aplikasi SIMFONI BMD untuk menindaklanjuti proses Inventarisasi Barang Milik Daerah.

Kebijakan Pengelolaan BMD

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, BMD menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, masing-masing daerah diberikan

kesempatan dalam mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai potensi dan kebutuhan yang ada. salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah terkait penyediaan BMD yang digunakan untuk pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat

Penerapan SIMFONI BMD

Salah satu aplikasi dalam mengelola keuangan daerah yang telah dikembangkan adalah program aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Daerah (SIMFONI BMD) yang dapat digunakan sebagai pengolahan data pengelolaan inventaris barang dan aset pemerintah daerah dengan adanya program aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah SKPD untuk menyajikan laporan, karena sebelumnya secara offline atau manual itu memakan waktu.

Program aplikasi SIMFONI BMD yang digunakan pada dasarnya digunakan untuk melakukan proses pengelolaan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) secara otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik. Proses penerapan aplikasi SIMFONI BMD itu sendiri merupakan amanat pemerintah dalam Negeri No 47 Tahun 2001 tentang tata cara pelaksanaan dan pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, dalam hal ini disebut inventarisasi. Pelaksanaan SIMFONI BMD adalah tindak lanjut pelaksanaan sensus barang milik daerah, tentunya dalam pelaksanaan sensus aset itu perlu adanya suatu inovasi yang harus diterapkan dalam aplikasi SIMFONI untuk memudahkan proses sensus, dilihat pada era sekarang teknologi sudah semakin canggih dan sudah terdigitalisasi di dalam database.

Adapun tahapan atau sebelum proses input ke aplikasi SIMFONI yaitu tim lapangan yang mensurvei barang, lalu pengecekan itu di paraf agar data yang sudah di sensus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dalam kondisi baik, barangnya ada atau tidak, setelah baru di input ke aplikasi SIMFONI BMD. Jadi tidak hanya dengan bukti fisik tetapi ada juga dengan cara di input.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi SIMFONI BMD yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebagai aplikasi berbasis komputer sangat membantu pemerintah mengelola barang milik daerah sehingga dapat menghasilkan laporan-laporan yang berguna bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan untuk rencana yang akan datang.

2. Dalam penatausahaan aset daerah, khususnya mengoperasikan aplikasi SIMFONI BMD yang terdapat 7 entry yang dioperasikan, yaitu:
 - Tanah
 - Peralatan dan Mesin
 - Gedung dan bangunan
 - Jalan, jaringan, dan irigasi
 - Aset tetap lainnya
 - ATB (Aset Tidak Berwujud)
3. Informasi-informasi yang dihasilkan SIMFONI BMD pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sangat penting dan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya
4. Aplikasi SIMFONI BMD belum cukup efektif karena masih terkendala jaringan, tools atau alat komputer, dan SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. (www.bpkp.go.id)
- Gelinas dan Dull 2012, *Accounting information system 9th Edition*. South Western Cengage Learning.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK. 05/2011 *Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014, Pengelolaan Barang Milik Daerah Pontoh, Winston. 2013 *"Akuntansi Konsep dan Aplikasi"*. Penerbit Halaman Moeka, Jakarta.
- Pengelolaan barang milik negara/daerah (BMD), Pub. L. No. 6 (2006).
- Pedoman pengelolaan barang milik daerah (BMD), Pub. L. No. 19 (2016).
- Prayoga, R. (2020). *Analisis pelaksanaan penghapusan barang milik daerah oleh kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau*. UIN Syarif Kasim Riau